

SOAL PSAJ PKN

1. Contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai praksis Pancasila dalam kehidupan keluarga adalah ...
 - A. Menghormati orang yang lebih tua
 - B. Menentang pendapat orang tua
 - C. Peduli terhadap kepentingan orang lain
 - D. Peduli terhadap kesusahan orang lain
 - E. Memanjat tembok di belakang sekolah
2. Batas maksimal dapat menentukan anak seorang kewarganegaraannya akibat perkawinan campuran adalah ...
 - A. 15 tahun
 - B. 16 tahun
 - C. 17 tahun
 - D. 18 tahun
 - E. 19 tahun
3. Menurut UUD 1945 pasal 30 ayat 2 menyatakan "usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui".
 - A. Sistem pertahanan dan keamanan yang menyeluruh
 - B. Sistem keutuhan wilayah semesta
 - C. Sistem pertahanan wilayah antar pulau
 - D. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
 - E. Sistem pertahanan rakyat semesta
4. Lembaga negara sebelum amandemen UUD Tahun 1945 yang tidak terdapat dalam struktur ketatanegaraan RI sesudah amandemen UUD Tahun 1945 adalah ...
 - A. Badan Pemeriksa Keuangan
 - B. Dewan Pertimbangan Agung
 - C. Mahkamah Konstitusi
 - D. Komisi Pemberantasan Korupsi
 - E. Komisi Yudisial
5. Di bawah ini contoh sikap yang harus dikembangkan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan ...
 - A. Seluruh warga saling menghormati pelaksanaan ibadah, baik agamanya maupun agama lain.
 - B. Seluruh warga dapat mencampur adukkan ajaran agama.
 - C. Semua warga acuh tak acuh terhadap agamanya maupun agama orang lain.
 - D. Seluruh warga memilih sikap memaksakan agama kepada orang lain.
 - E. Seluruh warga memilih sikap fanatik yang berlebihan terhadap agamanya.
6. Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, meliputi nilai dasar, instrumental dan praksis.

Makna dari nilai praksis adalah

 - A. nilai yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan
 - B. nilai yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari
 - C. nilai yang diterima sebagai dalil yang berasal dari nilai kultural

- D. nilai yang diambil dari kepribadian bangsa dan negara Indonesia
- E. nilai yang dapat dipraktikkan untuk kemajuan di bidang budaya bangsa

7. Salah satu contoh nilai praksis sila pertama Pancasila dalam penerapan kebijakan pemerintahan NKRI adalah

- A. menghormati perayaan hari besar umat agama lainnya
- B. ikut serta dalam perayaan hari besar agama lain
- C. tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah
- D. berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan berbagai aktivitas di sekolah
- E. menetapkan hari-hari besar keagamaan

8. Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah menetapkan konsep merdeka belajar, salah satunya dengan menghapus Ujian Nasional (UN) tahun 2021. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing sekolah khususnya dalam menentukan kelulusan siswanya. Selain itu, kegiatan belajar bisa dilakukan secara eksploratif bukan hanya di dalam ruangan kelas namun menyesuaikan dengan materi dan kondisi yang ada. Harapannya, sekolah bisa menjadi ruang belajar yang merdeka dan proses memanusiakan manusia.

Kebijakan pemerintah tersebut dilandasi oleh nilai Pancasila yaitu nilai

- A. ketuhanan dan kemanusiaan
- B. persatuan dan kemanusiaan
- C. kemanusiaan dan keadilan
- D. kerakyatan dan persatuan
- E. persatuan dan keadilan

9. Manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UUD NRI 1945?

- A. Warga Negara Indonesia merupakan seluruh orang yang menempati wilayah Indonesia.
- B. Setiap orang asing yang menempati wilayah Indonesia adalah warga Negara Indonesia.
- C. Penduduk Indonesia meliputi orang Indonesia asli dan orang asing yang disahkan Undang-undang.
- D. Orang asing yang telah disahkan dengan undang-undang merupakan warga negara Indonesia.
- E. Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan penduduk Indonesia.

10. Komponen sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah

- A. Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama bidang pertahanan
- B. Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen pendukung bidang pertahanan
- C. Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat merupakan komponen pendukung bidang pertahanan
- D. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen cadangan sistem pertahanan
- E. Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen utama bidang keamanan dan pertahanan

11. Hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif disebut

- A. hukum agama
- B. hukum tidak tertulis
- C. hukum tertulis
- D. hukum adat
- E. hukum tradisi

12. Sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah

- A. peraturan daerah
- B. peraturan pemerintah
- C. Undang-undang
- D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- E. Peraturan Organisasi

13. Hukum yang bersumber dari ajaran agama disebut

- A. hukum agama
- B. hukum tidak tertulis
- C. hukum tertulis
- D. hukum adat
- E. hukum tradisi

14. Pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum dan keadilan disebut pemerintahan

- A. otoriter
- B. tirani
- C. diktator
- D. demokratis
- E. semua benar

15. Bentuk pemerintahan di Indonesia adalah

- A. monarki absolut
- B. republik parlementer
- C. republik presidensial
- D. monarki konstitusional
- E. republik absolut

16. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang disebut kekuasaan

- A. eksekutif
- B. ideologi negara
- C. legislatif
- D. yudikatif
- E. semua benar

Jawaban: A

17. Kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang disebut kekuasaan

- A. legislatif
- B. eksekutif
- C. konstitutif
- D. yudikatif
- E. semua benar

18. Kekuasaan untuk membuat undang-undang disebut kekuasaan

- A. legislatif
- B. eksekutif
- C. konstitutif
- D. yudikatif
- E. semua benar

19. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki fungsi sebagai

- A. pedoman hidup
- B. ideologi negara
- C. sumber hukum tertinggi
- D. ideologi perorangan
- E. semua benar

20. Sifat negara yang mempunyai kekuasaan penuh dalam membuat hukum, tetapi hukum yang dibuat dalam masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum negara adalah sifat negara

- A. demokratis
- B. otoriter
- C. hukum
- D. absolut
- E. ideologi

21. Sistem pemerintahan presidensial yang digunakan sekarang memberi kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan ...

- A. Fungsi anggaran
- B. Fungsi kontrol
- C. Fungsi pengayoman
- D. Fungsi pendidikan
- E. Fungsi informasi

22. Sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 bahwa pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat ke daerah merupakan pembagian kekuasaan negara ...

Advertisement by

- A. Sesuai prinsip Pacta Sunt Servada
- B. Secara De Jure
- C. Secara vertikal
- D. Secara horizontal
- E. Secara De Facto

23. Yang termasuk pembagian kekuasaan diluar pembagian kekuasaan trias politika adalah ...

- A. Konstitutif, eksekutif, dan legislatif
- B. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif
- C. Legislatif, yudikatif, dan eksaminatif
- D. Yudikatif, eksaminatif, dan moneter
- E. Konstitutif, eksaminatif, dan moneter

24. Berikut ini tidak termasuk dalam tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah ...

- A. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah
- B. Mengoptimalkan potensi daerah
- C. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
- D. pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan
- E. Desentralisasi melahirkan otonomi daerah

25. Kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah- kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat check and merupakan pernyataan tentang negara memuat ...

- A. Harmaily Ibrahim
- B. Montesquieu
- C. Zul Afdi Ardian
- D. Jimly Ashiddiqie
- E. Moh. Kusnardi

26. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas ...

- A. Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan
- B. Pasal, aturan peralihan dan aturan penjas
- C. Pasal-pasal
- D. Pembukaan dan penjelasan
- E. Pembukaan dan batang tubuh

Jawaban: A

27. Pemerintah daerah dan DPRD menganut asas ...

- A. Ekonomi dan politik
- B. Otonomi dan politik
- C. Sosial dan politik
- D. Otonomi dan ekonomi
- E. Otonomi dan tugas pembentukan

28. Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak dikoordinasikan oleh menteri tetapi langsung dari presiden adalah ...

- A. Badan Informasi Geospasial
- B. Badan Intelijen Negara
- C. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- D. Badan Pertanahan Nasional
- E. Badan Tenaga Nuklir Nasional

29. Menurut UU No. 39 Tahun 2008 jumlah maksimal kementerian negara adalah ...

- A. 20
- B. 23
- C. 34
- D. 40
- E. 43

30. Dalam menjalankan pemerintahan Presiden selalu berkomunikasi dan membicarakan dengan menteri- menterinya. Hal ini sesuai dengan nilai- nilai ...

- A. Membina kerukunan hidup antar umat beragama
- B. Tidak semena-mena terhadap orang lain
- C. Bermusyawarah dalam menyelesaikan segala urusan
- D. Menempatkan kepentingan pribadi diatas kepentingan bangsa dan negara
- E. Menjunjung hak warga negara berdasarkan sikap non diskriminatif

31. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan ...

- A. Konstitutif
- B. Legislatif
- C. Federatif
- D. Yudikatif
- E. Eksaminatif

32. Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga

- A. MPR, DPR, DPRD dan DPD
- B. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
- C. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
- D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
- E. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung

33. Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan ...

- A. Konstitutif
- B. Legislatif
- C. Federatif
- D. Yudikatif
- E. Eksaminatif

34. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang

keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah ...

- A. Menteri Keuangan RI
- B. Dewan Perwakilan Daerah
- C. Dewan Perwakilan Rakyat
- D. Gubernur Bank Indonesia
- E. Badan Pemeriksa Keuangan

35. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....

- A Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
- B Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara
- C Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
- D Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariat negara
- E Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.

36. Kegiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....

- A. Membentuk kabinet menteri
- B. Membahas rancangan undang-undang APBN
- C. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan APBN
- D. Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba
- E. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

37. Perhatikan fungsi Kementerian negara berikut !

- 1) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri
- 2) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah diseluruh Indonesia
- 3) melaksanakan koordinasi, melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya

4) menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.

5) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Dari data tersebut, yang termasuk fungsi kementerian koordinator ditandai oleh nomor

A. 1) dan 2)

B. 1) dan 3)

C. 2) dan 3)

D. 3) dan 4)

E. 3) dan 5)

38. Dibawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman...

A. Kementerian Pariwisata

B. Kementerian Perhubungan

C. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

D. Kementerian Kelautan dan Perikanan

E. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

39. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas...

A. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

B. Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

C. Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya,

D. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

E. Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945

40. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang adalah kekuasaan ...

- A. Konstitutif
- B. Legislatif
- C. Eksekutif
- D. Yudikatif
- E. Eksaminatif

41. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan ...

- A. Konstitutif
- B. Legislatif
- C. Federatif
- D. Yudikatif
- E. Eksaminatif

42. Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga

- A. MPR, DPR, DPRD dan DPD
- B. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
- C. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
- D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
- E. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung

43. Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan ...

- A. Konstitutif
- B. Legislatif
- C. Federatif

D. Yudikatif

E. Eksaminatif

44. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah ...

A. Menteri Keuangan RI

B. Dewan Perwakilan Daerah

C. Dewan Perwakilan Rakyat

D. Gubernur Bank Indonesia

E. Badan Pemeriksa Keuangan

45. Hubungan kerja antara Presiden dengan DPR menurut pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 adalah

A. Menetapkan dan mengesahkan APBN

B. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan

C. Mengangkat menteri-menteri untuk memimpin departemen

D. Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain

E. Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan Negara lain

46. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !

1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif.

2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri

3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.

4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan

5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden

Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...

- A. 1 dan 2
- B. 2 dan 3
- C. 3 dan 5
- D. 4 dan 6
- E. 5 dan 6

47. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....

- A. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
- B. Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara
- C. Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
- D. Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri kesekretariatan negara
- E. Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.

Jawaban: A

48. Kegiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....

- A Membentuk kabinet menteri
- B Membahas rancangan undang-undang APBN
- C Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan APBN
- D Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba
- E Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

49. Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah.....

- A Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD
- B Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

C Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden

D Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

E Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR

Jawaban: D

50. Di bawah ini yang merupakan ciri dari sistem pemerintahan Presidensial.....

A Raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara

B Eksekutif mempunyai hubungan yang sangat erat

C Mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen

D Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

E Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen, Kepala negara akan membubarkan parlemen